

LAPORAN PENELITIAN STIMULUS



**KEKUASAAN PRESIDEN DI INDONESIA
OLEH :**

NAMA : Dr. Asran Jalal, M.Si

NIP : 0110880246

NIDN : 0328106101

**UNIVERSITAS NASIONAL
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
JAKARTA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Kekuasaan Presiden di Indonesia

Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Asran Jalal, M.Si.
 b. NID/NIDN : 0110880246/0328106101
 c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 d. Pangkat/Golongan : IVA
 e. Program Studi : Ilmu Politik
 f. Alamat Rumah : Perumahan Waringin Elok A9/19 Rt 004/012 Desa
 kedung

Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kab. Bogor,
 Jawa Barat.

g. Telepon : 081284526468
 h. Email : asran_jalal@yahoo.com

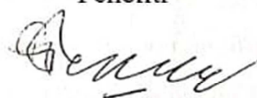
Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
 Biaya Penelitian : Rp. 8.000.000,-

Mengetahui,
 Direktur Sekolah Pascasarjana

 Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA.



Jakarta, 10 Januari 2021
 Peneliti



Dr. Asran Jalal, M.Si

Menyetujui,
 Wakil Rektor Bidang PPMK

 Prof. Dr. Etnawati Sinaga, MS., Apt.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan hidayah yang diberikah kepada kita semua, sehingga penelitian yang berjudul “Kekuasaan Presiden di Indonesia” dapat diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang tenaga pengajar di perguruan tinggi pada umumnya dan di Universitas Nasional khususnya melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Penelitian untuk semester genap tahun ajaran 2019/2020.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor Unas, Dr. El Amry Bermawi Putera, MA, atas kebijakannya yang memberikan bantuan stimulus penelitian untuk dosen. Kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA, atas dorongan yang diberikan kepada penulis untuk meneruskan ide melaksanakan penelitian dengan judul tersebut di atas, dengan alasan penelitian yang berkaitan dengan konsep dan teori dalam Ilmu Politik masih langka. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Ilmu Politik Dr. Alfian Alfian, atas dukungan yang diberikannya.

Terima kasih kepada pimpinan Universitas Nasional memberi kesempatan kepada penulis untuk membuat penelitian sesuai dengan topik yang penulis ajukan. Lebih dari itu dukungan dana yang diberikan kepada penulis, merupakan semangat tambahan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu politik dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya. n rencana.

10 Januari 2021

Asran Jalal

ABSTRAK

Fokus studi ini adalah kekuasaan presiden Indonesia, khususnya studi kepemimpinan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Tujuan penelitian yaitu pertama, memahami variabel yang membentuk kepemimpinan Presiden Soekarno. Merumuskan kepemimpinan Presiden Soeharto dan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan variabel yang membentuknya. Metode penelitian bersifat kualitatif, pengumpulan data melalui studi pustaka.

Hasil penelitian variabel yang membentuk kepemimpinan Presiden Soekarno memiliki gaya *solidarity maker* dipengaruhi budaya Masyarakat Jawa dan pengalaman praktek demokrasi parlementer. Kepemimpinan *solidarity maker* relevan untuk menjelaskan kepemimpinan Presiden Soeharto, faktornya adalah pengaruh budaya Masyarakat Jawa dan latar belakang profesinya sebagai militer. kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang bersifat *demokratik-responsif*. Faktornya adalah lingkungan nasional mengalami demokratisasi dan lingkungan internasional menguatnya isu globalisasi dan demokratisasi.

Temuan studi, kepemimpinan *solidarity maker* yang melekat pada Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, dapat berubah menjadi *demokratik-responsif*, ketika kuatnya tekanan massa yang didukung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Implikasi teori konsep Herbert Feith tentang kepemimpinan *solidarity maker*, relevan menjelaskan kepemimpinan Presiden Soeharto, tidak relevan untuk menjelaskan kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

Kata Kunci: Kepemimpinan Presiden Soekarno, Kepemimpinan Presiden Soeharto, Kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

ABSTRACT

The focus of this study is the power of the president of Indonesia, particularly the study of the leadership of President Soekarno, President Soeharto and President Soesilo Bambang Yudhoyono. The research objectives are first, to understand the variables that shape President Soekarno's leadership. Formulate the leadership of President Soeharto and President Soesilo Bambang Yudhoyono and the variables that shape them. The research method is qualitative, collecting data through literature study.

The results of the research on variables that shape President Soekarno's leadership have a solidarity maker style influenced by Javanese culture and experience of parliamentary democracy practice. The leadership of solidarity maker is relevant to explain President Soeharto's leadership, the factor is the cultural influence of the Javanese culture and their professional background as a military. President Soesilo Bambang Yudhoyono's leadership that is democratic-responsive. The facilitator is the national environment experiencing democratization and the international environment the strengthening of the issue of globalization and democratization.

The findings of the study, the leadership of the solidarity maker attached to President Soekarno and President Soeharto, can turn into democratic-responsive, when the mass pressure is strong, supported by People's Representative Council (DPR).

The implication of the theory of Herbert Feith's concept of solidarity maker leadership, relevant to explaining President Soeharto's leadership, is not relevant to explaining the leadership of President Soesilo Bambang Yudhoyono.

Keywords: Leadership of President Soekarno, Leadership of President Soeharto, Leadership of President Soesilo Bambang Yudhoyono.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kabinet Masa Demokrasi Parlementer.....	7
Tabel 2	Kabinet Presiden Soekarno 1959-1966.....	22
Tabel 3	Kabinet Presiden Soeharto 1967-1998.....	31
Tabel 4	Perolehan Suara Golkar Pemilu 1971.....	35
Tabel 5	Perolehan Suara Golkar 1971-1997.....	36
Tabel 6	Sumber Uang Internal Golkar.....	36
Tabel 7	Peta Kekuatan DPR 1971-1997.....	37
Tabel 8	Peta kekuatan MPR 1971-1997.....	37
Tabel 9	Partai Koalisi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 dan 2009.....	42

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK-----	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah Penelitian.....	1
B. Masalah Penelitian.....	3
C. Pertanyaan Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Teori Sistem Presidensial.....	6
B. Studi Kekuasaan Presiden.....	12
BAB III Metode Penelitian	
A. Pendekatan.....	14
B. Sumber Data.....	14
C. Analisis Data.....	15

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

- A. Relasi Kekuasaan Pejabat Kementrian, Pejabat Pemda,
Pengusaha dan Prilaku Korupsi Anggota DPR.....17
- B. Variabel Pendukung Prilaku Korupsi Anggota DPR.....51

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....58
- B. Temuan Penelitian.....59
- C. Konstruk Teori.....59
- D. Implikasi Studi dan Kebijakan.....60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia semenjak merdeka tahun 1945, sudah memiliki memiliki 7 orang presiden. Presiden Soekarno memerintah tahun 1945-1967, Presiden Soeharto memerintah pada tahun 1967-1998, Presiden B.J. Habibie memerintah tahun 1998-1999, Presiden Abdurrahman Wahid memerintah tahun 1999-2001, Presiden Megawati Soekarnoputri memerintah tahun 2001-2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintah tahun 2004-2014, Presiden Joko Widodo memerintah mulai tahun 2014, kemungkinan sampai 2024.

Presiden Soekarno dipilih menjadi berdasarkan keputusan Panitia Kemerdekaan Republik Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Keputusan PPKI salah satunya adalah, menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.¹ Presiden Soekarno diberhentikan MPRS melalui melalui Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. Alasannya krisis politik yang terjadi tahun 1965 yang dikenal dengan Peristiwa Gerakan 3 September (G.30 S. PKI), dimana dalam peristiwa tersebut terjadi pembunuhan 6 orang pewira tinggi Angkatan Darat, membuat situasi politik dalam keadaan krisis.

Presiden Soeharto diangkat menjadi presiden oleh MPRS tahun 1968 melalui Tap MPRS No. XLIV tahun 1968 yang menyatakan “Mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: 1998.

Indonesia hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum (Pemilu). Jabatan sebelumnya adalah Panglima Komando Operasi Ketertiban dan Keamanan (Kopkamtib) yang diangkat Presiden Soekarno pada tanggal 2 Oktober 1965 untuk memulihkan situasi keamanan dan ketertiban. Presiden Soeharto mundur sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 atas desakan kelompok proreformasi yang didominasi mahasiswa.

Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI di Istana Negara dihadapan ketua Mahkamah Agung dan pimpinan MPR/DPR, setelah Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya. Kekuasaan Presiden BJ Habibie berakhir pada tanggal 20 Oktober 1999, setelah menyatakan tidak bersedia dicalonkan MPR hasil Pemilu 1999 sebagai calon presiden RI periode 1999-2004. Sikap Presiden B.J Habibie diambil, setelah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ditolak dalam Sidang Umum (SU) MPR pada tanggal 14 Oktober 1999. Hasil pemungutan suara LPJ Presiden B.J Habibie dalam SU MPR, sebanyak 355 suara anggota menolak, 322 suara anggota menerima, 9 suara anggota abstain, dan 4 suara anggota tidak sah, selisih suara yang menolak dengan yang menerima adalah $355-322 = 33$ suara. Penolakan pertanggungjawaban Presiden B.J Habibie disebabkan yakni adanya kekhawatiran elite-elite partai akan munculnya gerakan radikal baru dalam bentuk *people power*.²

Presiden Abdurrahman Wahid yang dipilih MPR hasil Pemilu 1999. Pemilu 1999 merupakan Pemilu yang berlangsung secara demokratis pertama pascaSoeharto, yang diikuti banyak partai politik. Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan MPR melalui Sidang Istimewa (SI) pada tanggal 23 Juli 2001, Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dianggap terlibat kasus kasus Dana

² Vedi R. Hadiz, *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia pasca-Soeharto*, Jakarta, LP3ES, 2005, h. 265-267.

Yanatera Bulog dan dana sumbangan dari Sultan Brunei. Kedua kasus dimaksud dikenal dengan istilah ‘*Buloggate*’ dan ‘*Bruneigate*’.)³

Presiden Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi Presiden RI melalui Sidang Istimewa (SI) MPR pada tanggal 23 Juli 2001, menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk kabinet yang disebut Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini meneruskan koalisi sebelumnya, para menteri berasal dari unsur partai politik, kecuali Partai keadilan.⁴ Jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri berakhir pada tahun 2004, karena Megawati Soekarnoputri yang berpasangan dengan Prabowo Subianto dikalahkan oleh pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla melalui Pemilu secara langsung.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden pertama menjadi presiden yang dipilih rakyat secara langsung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi pada Pemilu tahun 2004 dan pemilu tahun 2009. Pemilu tahun 2004, Pasangan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono/Yusuf Kalla berhasil meraih 33,58 % suara pemilih, sementara pasangan lainnya Megawati Soekarnoputri/Hasyim Muzadi meraih 26,24 % pada puran Pemilu kedua. Pada Pemilu 2009, Pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono/Budiono Kembali terpilih menjadi presiden dengan raihan suara sebesar 60,80 %, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri/Prabowo Subianto hanya meraih suara sebesar 26,79 % suara pemilih. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam membangun kabinet tahun 2004 dan 2009 membentuk kabinet berkoalisi dengan partai pendukung.⁵ Kekuasaan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono berakhir pada Pilpres tahun

³ *Ibid.*

⁴ Leo Suryadinata, *Election and Politics in Indonesia*, Singapore, ISEAS, 2002, h. 260-265.

⁵ Syamsuddin Haris, “Koalisi dalam Demokrasi Sistem Presidensial Indonesia: Faktor-Faktor Kerapuhan Koalisi Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 8, No.1, 2011, h. 1-14.

2009, hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur UUD 1945 hasil amandemen, batasan jabatan presiden hanya dua periode ini.

Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) terpilih menjadi presiden hasil Pemilu langsung tahun 2014 dan tahun 2019. Pilpres tahun 2014, Presiden Jokowi berhasil menjadi presiden dengan memperoleh 53,15 % suara, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto/Hatta Rjasa. Pemilu 2019, Presiden Jokowi berhasil jadi presiden dengan memperoleh raihan suara 55,50 % suara, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto/Sandiaga Uno memperoleh suara 45,50%. Kabinet Presiden Jokowi hasil Pemilu 2014 bernama kabinet kerja 2014-2019, jumlah menteri kabinet sebanyak 34 yang dibentuk pada tanggal 27 Oktober 2014 dan demisioner pada tanggal 20 Oktober 2019. Presiden Jokowi membentuk kabinet hasil Pemilu 2019, yang bernama Kabinet Indonesia Maju dengan jumlah menteri atau jabatan setingkat Menteri berjumlah 38 yang dibentuk pada tanggal 23 Oktober 2019.

Tulisan ini hendak membahas kepemimpinan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alasannya adalah Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto termasuk presiden yang cukup lama menjadi presiden. Presiden Soekarno menjadi presiden selama 32 tahun, Presiden Soeharto memerintah selama 32 tahun. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono berhasil menjadi presiden selama 2 periode berturut-turut yaitu tahun 2004 dan 2009.

Alasan tidak memasukkan 3 presiden lainnya dalam pembahasan analisis dengan pertimbangan masa jabatan masing-masing presiden. Presiden B.J Habibie memerintah selama 1 tahun, posisinya hanya menggantikan Presiden Soeharto yang mundur dari jabatannya. Presiden Abdurrahman Wahid yang dipilih MPR hasil Pemilu demokratis, diberhentikan MPR sebelum masa jabatannya berakhir. Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi presiden menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid, posisi Presiden Mewatisularnoputri sebelumnya adalah wakil presiden. Presiden Joko Widodo masa jabatan keduanya baru selesai tahun 2024.

B. Masalah Penelitian

Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki prilaku kepemimpinan yang berbeda dan merupakan ciri khas dari masing-masing gaya kepemimpinan presiden. Herbert Feith merumuskan gaya prilaku politik Presiden Soekarno bercorak *solidarty maker*. Presiden Soekarno dalam menjalan kekuasaannya memiliki gaya membangun kewibawaan pemerintah (*legitimation*) dan membangun kesan, rakyat harus punya kesan positif dan patuh pada pemerintah, mengutamakan pembangunan persatuan bangsa.⁶ Afan Gaffar merumuskan gaya kepemimpinan Presiden Soekarno dalam memerintah pada masa Demokrasi Terpimpin, bergaya diktator, karena Presiden Soekarno menjadi pemimpin yang sangat berkuasa dan menjadi seorang Presiden sangat kuat (*powerfull*) dalam mengendalikan politik Indonesia, tanpa ada satu kekuatan politik yang mampu mengimbangnya.⁷ Perwujudan prilaku Presiden Soekarno yang demikian terlihat Ketika membuarkan DPR, dilanjutkan dengan mengangkat anggota yang baru.

Presiden Soeharto masa Orde Baru memiliki corak kepemimpinan otoriter dengan berbagai istilah yang digunakan para ilmuwan politik. Dwight Y. King menyebutnya dengan istilah rezim birokatik otoriter (*buereuctic authoritarian regime*), karena institusi di luarnya seperti DPR dan partai politik, dan *civil society* tidak berdaya untuk mengontrol kekuasaan Presiden Soeharto.⁸ Bentuk

⁶ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962, p. 113-122.

⁷ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 27.

⁸ Dwight Y. King, Indonesia's New Order as Bureaucratic Politiy, a Neopatrimonial Regime or a Bureaucratic Authoritritarian Regime: What Difference Doe It Make? Benecict Anderson and Audrey Kahin (ed), *Interim Reports Series Publication No. 62, Cornell Modern Indonesia Project Southeast Asia Program*, New York: Cornell Uniniversity Ithaca, 1982. P. 104-117.

kepemimpinan Presiden Soeharto yang demikian terlihat kebijakannya dengan memperlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) menghadapi Gerakan Aceh merdeka (GAM). Presiden Soeharto aspek latar belakang tantara, jabatan terakhir sebelum menjabat presiden sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Pada saat menjabat presiden, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi.

Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki model atau gaya kepemimpinan dengan ciri moderat, mementingkan intelektualitas, keterbukaan pikiran, pola penalaran sistemik, kebutuhan prestasi, kebutuhan afiliasi, dan menjaga wibawa dalam melaksanakan kekuasaannya.⁹ Salah perwujudan prilaku Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang moderat dan adatif adalah selama 2 kali menjadi presiden menyertakan semua partai politik koalisi dalam kabinet. Presiden Soeslo Bambang Yudhoyono berlatar belakang tantara, jabatan terakhir dalam struktur tantara adalah Kepala Sosial Politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Kasospol ABRI). Aspek kultur, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono berasal dari masyarakat Jawa. Situasi sosial politik masyarakat Indonesia Ketika menjadi presiden sedang menghadapi eforia demokrasi.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran, terdapat persamaan dan perbedaan ketiga presiden tersebut di atas dalam hal prilku kepemimpinan dalam menggunakan kekuasaannya. Persamaan aspek corak prilaku kepemimpinan antara Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto memiliki persamaan lebih cenderung bergaya otoritarian dalam menggunakan kekuasaannya. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono cenderung bergaya demokratis. Aspek latar belakang karir politik, Presiden Soekarno berlatar belakang sipil, Presiden Soeharto dan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono berlatar belakang tantara. Persamaan ketianga presiden tersebut dari aspek budaya, sama-sama berasal dari masyarakat Jawa. Perbedaan

⁹ Bagus Takwin dan Niniek L. Karim, *Sang Kandidat: Analisis Psikologi Politik Lima Kandidat Presiden da Wakil Presiden RI Pemu 2004*, Jakarta: Kompas, 2004, h. 239-246.

yang melekat adalah lingkungan politik an ekonomi masyarakat yang dihadapi saat menjabat sebagai presiden.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan masalah penelitian tersebut di atas, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel apa yang mempengaruhi kepemimpinan Presiden Soekarno dikategorikan bergaya solidarity maker? Bagaimana dengan kepemimpinan
2. Presiden Soeharto dan Presiden Soesilo Bambang Yudhyono? apa kepemimpinan Presiden Soeharto masuk dalam dikategorikan bergaya kepemimpinan solidarity maker dan kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhyono termasuk gaya kepemimpinan administrator dalam menggunakan kekuasaannya?
3. Variabel apa yang mempengaruhi kepemimpinan Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhyono?

D. Tujuan Penelitian

1. Memahami kepemimpinan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Susilo Bambang Yudhyono dalam menggunakan kekuasaannya.
2. Memahami variable utama dan situasi yang mendukung kepemimpinan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Susilo Bambang Yudhyono dalam melaksanakan kekuasaannya.
3. Menguji konsep kepemimpinan Herbert Feith dan relevansinya dengan kepemimpinan Presiden Soeharto dan presiden Susilo Bambang Yudhyono.

E. Sistematika Laporan Penelitian

Penulisan hasil penelitian disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan. Bab ini memuat kerangka dasar penelitian. Bab ini merupakan kerangka dasar penelitian yang menguraikan, latar belakang masalah, masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II. Kerangka Teori. Bab ini memberi gambaran tentang landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup konsep teori kepemimpinan, studi-studi kepemimpinan presiden, dan rumusan kecenderungan studi kepemimpinan presiden.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini pada dasarnya berusaha memberikan gambaran mengenai metode dan prosedur yang digunakan dalam proses penelitian. Pokok bahasan dalam bab ini mencakup pendekatan penelitian, sumber data, dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Analisis Penelitian . Bab ini membahas gambaran mengenai hasil penelitian dan analisis hasil penelitian. Pembahasan mencakup, kepemimpinan Presiden Soekarno, kepemimpinan Presiden Soeharto, dan kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

BAB V Penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan penelitian, temuan penelitian, dan implikasi teori. Bagian kesimpulan pada intinya menjawab pertanyaan penelitian. Temuan penelitian merupakan temuan dari hasil analisis penelitian, implikasi teori merupakan analisis teori yang digunakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kepemimpinan Politik

Tobias van Assche menyatakan, studi kepemimpinan politik pada dasarnya meneliti bagaimana perilaku pemimpin politik individual dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan bagaimana ini dapat mempengaruhi tipe keputusan yang diambil. Tiga komponen personalitas yang mempengaruhi kepemimpinan tokoh dalam membuat keputusan yaitu: (1) motif; (2) kognisi dan keyakinan; (3) sifat. Motif pemimpin untuk bertindak didorong oleh motif: (1) kebutuhan akan kekuasaan; (2) prestasi; (3) afiliasi dengan orang lain. Kognisi dan keyakinan, mencakup bagaimana pemimpin menginterpretasikan, menyusun dan mengambil informasi, serta keyakinan umum pemimpin tentang sifat politik dan dunia pada umumnya. Apakah pemimpin memandang suatu masalah bersifat hitam-putih atau abu-abu. Sifat, berkaitan dengan sifat-sifat pemimpin seperti keramahan, berhati-hati (*conscientiousness*), keterbukaan pada pengalaman baru.¹⁰ Analisis studi kepemimpinan politik dapat juga dilakukan melalui analisis beberapa faktor variabel yang mempengaruhi pemimpin politik dalam membuat keputusan politik. Studi kepemimpinan politik dapat dilakukan pada presiden, perdana menteri, pimpinan organisasi politik seperti Sekjen PBB dan lainnya.

M. Brewster Smith dalam karyanya menjelaskan tentang perilaku pemimpin politik. Studi perilaku politik memiliki dua fokus utama yaitu tipologi kepribadian

¹⁰ Tobias van Assche, *Leadership and Decision Making*, John T. Ishiyama & Marijke Breuning (Ed), *21st Century Political Science a Reference Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publication Inc, 2011, p. 353-361.

pemimpin politik dan faktor yang mempengaruhi perilaku seorang pemimpin politik. Tipologi kepribadian pemimpin politik seperti pemimpin otoriter atau demokrat. Faktor mempengaruhi perilaku politik pemimpin yaitu: (1) lingkungan sistem politik tidak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa; (2) lingkungan sosial politik langsung seperti, keluarga, agama, keluarga, dan kelompok.¹¹

B. Studi Kepemimpinan Politik

James Barber, studinya tentang kepemimpinan presiden Amerika Serikat (AS). Barber dalam studinya membagi kategori presiden AS menjadi pasif atau aktif dalam hal energi yang dicurahkan untuk pekerjaannya, dan positif berdasarkan kepuasannya yang diperoleh dari posisinya. Berdasarkan kategori tersebut dapat muncul gabungan kategori yang melahirkan tipe kepemimpinan presiden, pertama kepemimpinan presiden aktif-negatif. Tipe kepemimpinan ini cenderung kompulsif dan tipe kepemimpinan berbahaya. Tipe kepemimpinan ini melekat pada Presiden Herbert Hoover, Presiden Lyndon Johnson, dan Presiden Nixon. Kedua tipe kepemimpinan presiden aktif-positif, tipe kepemimpinan ini cenderung adaptif dan kepemimpinan yang paling sukses. Tipe kepemimpinan ini melekat pada Presiden Bill Clinton dan Presiden Jimmy Carter.¹²

Rebecca E. Deen, dalam studinya lembaga kepresidenan di Amerika, mengemukakan bahwa beberapa cara yang digunakan oleh Presiden menghadapi tekanan kongres yaitu: (1) menggunakan perangkat informal dengan cara melakukan tawar-menawar dengan kongres dari ancaman veto; (2) presiden

¹¹ M. Brewster Smith. A Map for Analysis personality and Politics, *Journal of Social Issues*, Vol. 24, No. 23, p.

¹² Barber, James.D, *The Presidential Character: Predicting performance in the White House*, (third edition), Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hill, 1992.

dapat memerintahkan birokrasinya untuk tidak mengimplementasikan bagian tertentu dari undang-undang yang ditandatanganinya.¹³

Studi perilaku kepemimpinan presiden di Indonesia sudah dimulai semenjak kepemimpinannya Presiden Soekarno. Herbert Feith,¹⁴ membagi corak kepemimpinan elite politik Indonesia menjadi 2 yaitu administrator dan *solidarity maker*. Sebagaimana dikatakannya:

In discussing the revolutionary period we saw how the country's situation create conflict between "administrator's", in the sense of leaders with the administrative, technical, legal, and foreign-language skills required to run the distinctively modern apparatus of a modern state, and "solidarity maker", leaders skilled as mediators between groups at different levels of modernity and political effectiveness, as mass organizers, and as manipulators of integrative symbols."

"Dalam membahas periode revolusioner, kita melihat bagaimana situasi negara menciptakan konflik antara pemimpin "administrator", dalam arti para pemimpin dengan keterampilan administratif, teknis, hukum, dan bahasa asing yang dibutuhkan untuk menjalankan aparatur modern seperti negara modern, dan pemimpin "solidarity maker", pemimpin yang memiliki keterampilan sebagai mediator antar kelompok di berbagai tingkat modernitas dan efektivitas politik, sebagai pengorganisir massa, dan sebagai manipulator simbol-simbol persatuan."

Albert Widjaja menafsirkan konsep kepemimpinan Herbert Feith. Ciri kepemimpinan elite administrator fokus utama pemerintah yaitu: (a) membangun teknis administrasi; (b) pelaksanaan hukum; (c) kebijaksanaan membangun negara agar maju. Visi pembangunan pembangunan adalah kebijakan yang berorientasi pemecahan masalah sosial-ekonomi (*problem-solving*). Corak kepemimpinan ini

¹³ Rebecca E. Deen, "The Presidency," John T. Ishiyama & Marijke Breuning (Ed), *21st Century Political Science a Reference Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publication Inc, 2011, p. 725-735.

¹⁴ Herbert Feith, *Op.Cit*, p. 113-122.

melekat pada Wakil Presiden Mohammad Hatta. Ciri kepemimpinan elite *solidarity maker* fokus utama fungsi pemerintah yaitu: (a) membangun kewibawaan pemerintah (*legitimation*), rakyat harus punya kesan positif dan patuh pada pemerintah; (b) pembangunan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa (*nation building*), karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama; (c) pembangunan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa (*nation building*), karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Visi pembangunan adalah pembinaan bangsa, menekankan fungsi simbolis dan ritualism pemerintah sebagai lambang dan pusat kepemimpinan semua golongan masyarakat, lambang kesatuan, dan pembina tradisi bangsa. Corak kepemimpinan ini melekat pada Presiden Soekarno.¹⁵

Alber Widjaja, menjelaskan tentang pola kepemimpinan elite Indonesia yaitu kepemimpinan activism dan kepemimpinan legitimasi. Kepemimpinan activism memiliki ciri: (1) mendorong orang lain untuk mengambil peran dan tanggungjawab; (2) menumbukan sikap kritis dan bebas bagi pertumbuhan swasta. Kepemimpinan kepatuhan memiliki ciri: (1) mengambil alih tanggungjawab, mengharapkan orang lain ikut saja; (2) mengharap orang lain selalu setuju dengan pemimpin.¹⁶

Studi lembaga kepresidenan di Indonesia antara lain ditulis Afan Gaffar tentang kekuasaan lembaga kepresiden di Indonesia masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila. Menurut Afan, masa Demokrasi Terpimpin kekuasaan lembaga kepresidenan tidaklah sekuat seperti yang tertulis dalam UUD 1945. Presiden dalam prakteknya harus membagi kekuasaannya dengan Angkatan Darat (AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Figur Presiden Soekarno merupakan

¹⁵ Albert Widjaja, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1982, h. 123.

¹⁶ *Ibid*, h.129.

seorang pemimpin besar karena sangat berpengaruh, merupakan faktor sejarah yang tidak dapat diabaikan.¹⁷

Lembaga kepresidenan dalam pengertian presiden, wakil presiden, kabinet, dan kepala lembaga pemerintahan masa Orde Baru, memiliki sumber daya kekuasaan yang sangat besar, yang dapat dipergunakan untuk memelihara kekuasaan yang sedang dimilikinya, sehingga tidak ada seorangpun atau institusi apapun yang akan mampu bersaing dengan presiden yang sedang memegang jabatan. Sumber kekuasaan Presiden Soeharto yaitu: (1) mengontrol rekrutmen politik; (2) memiliki sumber daya keuangan yang besar. Kontrol rekrutmen politik dimaksud yaitu: (a) rekrutmen lembaga tinggi negara; (b) rekrutmen organisasi politik. Presiden memiliki personal otoritas (Pemegang Supersemar, Bapak Pembangunan), presiden merupakan Panglima Tertinggi.¹⁸

Sumber keuangan presiden berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Presiden dapat mengimplementasi APBN melalui sejumlah proyek melalui Intruksi Presiden (Inpres) seperti Inpres Pedesaan, Inpres Desa Tertinggal, Inpres Peningkatan jalan, Inpres Kesehatan, Inpres Pendidikan, Inpres Penghijauan. Kebijakan presiden lainnya berupa program Bantuan Presiden (Banpres). Presiden memiliki sumber anggaran non-APBN seperti Yayasan Amal Bhakti Mulim Pancasila untuk membantu membangun Masjid dan Yayasan Supersemar dengan program memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa. Penggunaan keuangan presiden, bertujuan membentuk citra, karena pemerintah yang memiliki uang, dan mempermudah mobilisasi dukungan rakyat.¹⁹

Mohtar Mas'ood, memusatkan perhatiannya pada proses menguatnya lembaga kepresiden pada masa Orde Baru. Secara teoritik, terdapat beberapa strategi untuk membangun kekuasaan yaitu: strategi yang digunakan untuk

¹⁷ Afan Gaffar, *Op.Cit*, h. 66

¹⁸ *Ibid*, h, 67-82

¹⁹ *Ibid*, h. 79-80.

membangun kekuasaan bidang politik yaitu: (1) menampilkan citra baik tentang kepribadian pemimpin; (2) membangun organisasi; (3) mengembangkan ideologi; (4) mengganjal pengikut dan menghukum penentang; (5) membangun ekonomi, dan memanfaatkan pembangunan ekonomi untuk memperoleh dukungan rakyat dan memberikan ganjaran kepada mereka yang mendukung pemerintah; (6) memanfaatkan politik politik luar negeri.²⁰

Menurut Mohtar Mas' oed, kekuasaan Jenderal Soeharto bersumber dari dua hal yaitu: (1) memanfaatkan dua wewenang khusus yang diperoleh dari Presiden Soekarno; (2) kemampuan membina sumber keuangan sendiri untuk tujuan patronase.²¹ Wewenang khusus yang diterima Presiden Soeharto yaitu menjadi Panglima Komando Operasi Ketertiban dan Keamanan (Kopkamtib) pada tanggal 2 Oktober 1965, dan Surat Perintah 11 Maret 1965 dari Presiden Soekarno. Bidang politik Presiden Soeharto membuat Dapur- Politik yakni keputusan dibuat melalui proses pertimbangan di antara beberapa perwira senior, diantaranya, Mayor Jenderal Sutjipto, Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Jenderal Alamsyah, Jenderal Yoga Sugama, Soerdjono Humardani, dan Ali Murtopo.

Presiden Soeharto menggali sumber keuangan berasal dari anggaran non-budgeter yaitu: (1) Badan Logistik (Bulog); (2) Pertamina; (3) sumber swasta yang dipungut dari pajak kegiatan ekspor kayu, kopra, karet, dan kopi; (4) pengusaha yang diberi hak monopoli. Dana-dana tersebut untuk program-program yang dirancang untuk membina konstituen atau pendukung di kalangan kekuatan politik non-pemerintah.²²

²⁰ Mohtar Mas' oed, "Lembaga Kepresidenan dan Resep Pengendalian Politik Indonesia", dalam Reza Noer Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h, 67-82.

Ibid, h. 97-98.

²¹ *Ibid*, h. 101.

²² *Ibid*, h. 105-106.

Karya Afan Gaffar dan Mohtar Maso'ed menggunakan pendekatan strategi presiden membangun kekuasaan, dengan pertanyaan mengapa kedua presiden tersebut bisa berkuasa dalam jangka waktu yang lama, tanpa ada satu institusi pun yang mampu mengawasi kekuasaannya.

Herberth Feith dan Albert Widjaja melihat kepemimpinan politik dengan pendekatan personaliti pemimpin dalam membuat keputusan, keduanya melahirkan kepemimpinan apa yang disebut pemimpin *solidarity maker*/pemimpin legitimasi dan pemimpin *administrator/aktivis*. Persoalannya faktor yang mempengaruhi kepemimpinan tersebut dan kepemimpinan mana yang sesuai mendukung demokrasi?

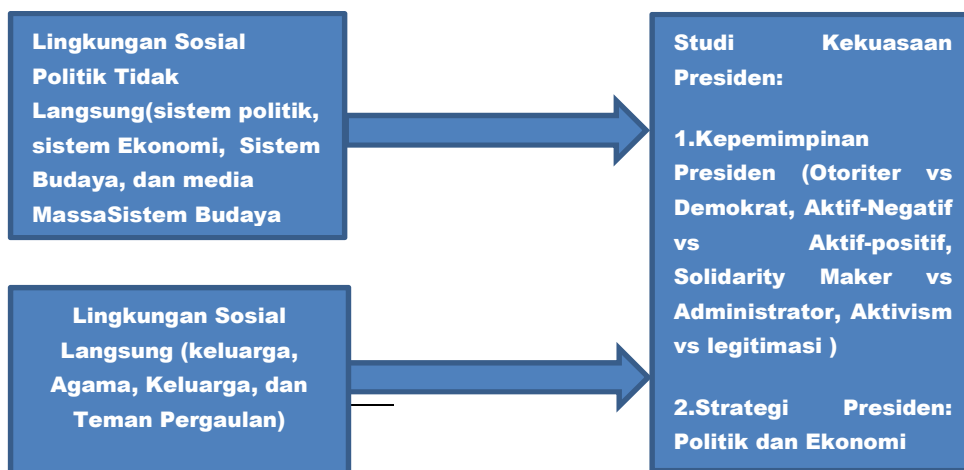
Studi tentang kekuasaan lembaga Presiden di Indonesia pasca-Orde Baru khususnya masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid, ditulis oleh Vedi Hadiz. Menurutnya, kemunculan Abdurrahman Wahid sebagai presiden merupakan hasil kompromi politik antara elite-elite partai politik untuk membangun koalisi berdasarkan kepentingan bersama. Kepentingan dimaksud adalah untuk mengamankan kepentingan elite-elite partai dengan jalan saling menjamin berbagi akses harta negara. Kepentingan lainnya adalah meredam gerakan massa untuk melaksanakan reformasi sistem politik Indonesia. Elite-elite partai merasa khawatir, kemenangan Megawati Soekarnoputri akan memancing reaksi dari kalangan organisasi Islam.²³

Wujud kompromi dari elite-elite partai politik setelah Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden adalah Megawati Soekarnoputri (PDIP) memperoleh kursi Wakil Presiden, Amin Rais (PAN) memperoleh kursi Ketua MPR, dan Akbar Tandjung (Partai Golkar) memperoleh kursi sebagai ketua DPR. Presiden Abdurrahman Wahid juga mengangkat sejumlah menteri mewakili partai politik.

²³ Vedi R. Hadiz, *Op.Cit*, h. 265-267.

Fakta lainnya adalah menteri Kabinet mencerminkan perwakilan partai pendukung sesuai dengan prosentasi jumlah kursi DPR.²⁴

Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid elite-elite partai karena presiden terlibat dalam kasus *bruneigate* dan *buloggate*, alasan tersebut bukan merupakan alasan sesungguhnya. Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid terjadinya disebabkan persaingan antara elite-elite partai memperebutkan kontrol terhadap lembaga negara beserta seluruh sumber dayanya. Ketika Presiden Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden, pemerintahannya sudah diwarnai persetujuan antara menteri kabinet memperebutkan kontrol terhadap Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sebuah institusi yang mengendalikan aset swasta yang dikendalikan negara dengan nilai 600 triliun rupiah. Persaingan itu juga tercermin dalam perebutan kontrol atas sejumlah perusahaan negara. Fakta lainnya adalah ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung juga terlibat menggunakan dana Bulog untuk kepentingan Pemilu.²⁵ Apa yang dikemukakan Vedi R. Hadiz pada dasarnya menjelaskan variabel lingkungan domestik terutama tekanan elite partai mempengaruhi lemahnya kekuasaan presiden. Model penjelasan studi kekuasaan presiden tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bercirikan induktif atau menjelaskan fenomena politik.²⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan. Pertama, penelitian ini menekankan pemahaman terhadap fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam.²⁷ Kedua, penelitian ini tanpa bertujuan menguji hipotesis. Ketiga, penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik. Tipe penelitian ini bersifat dekriptif-analitis yakni tipe penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial yang kompleks melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial politik secara analitis.²⁸

B. Sumber Data

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yakni sejumlah informasi dan data yang

²⁶ Lisa Harrison, *Political Research: An Introductin*, Routledge: Psychology Press, 2001, pp. 19-52.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Alicia Jencic, Alicia Jencic (2011), *Qualitative VS Quantitative Research*, John T. Ishiyama & Marijke Breuning *21st Century Political Science AReference Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Wasington DC: Sage Publication Inc, pp. 506-514.

diperlukan diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis berupa data-data yang bersumber dari dokumen, buku-buku, disertasi, tesis, jurnal, majalah, koran dan media internet.

C. Analisa Data

Analisa data penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahap yaitu tahap pengecekan data, tahap pengkatagorian data dan tahap penafsiran data, dan tahap kesimpulan. *Pertama*, tahap pengecekan data. Pengecekan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi, adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tehnik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah setelah data diperoleh melalui kepustakaan dilakukan pengecekan satu sama lainnya. Misalnya data tulisan di jurnal atau akan dicek dengan data-data dokumen. *Kedua*, tahap pengkatagorian atau pengklafikasian data. Dalam tahap ini data-data yang sudah dicek, kemudian diklasifikasi atau dikatagori menurut urutan pembahasan dalam penelitian *Ketiga*, tahap penafsiran data. Pada tahap ini dilakukan penafsiran atau pemberian makna yang signifikan terhadap data yang diklasifikasi dan dicari hubungannya satu sama lain. *Keempat*, tahap pengambilan kesimpulan dan implikasi teori. Pada tahap ini dilakukan pengambilan kesimpulan terhadap data dan fenomena yang sudah disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1967)

Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden berdasarkan keputusan Panitia Kemerdekaan Republik Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Kabinet pertama Presiden Soekarno bernama kabinet presidensial, jumlah menteri kabinet sebanyak 19 orang.²⁹

Perkembangan selanjutnya terjadi perubahan, kekuasaan presiden hanya sebatas kepala negara dan simbol negara, kekuasaan pemerintahan berada di bawah kekuasaan perdana menteri. Perubahan ini terjadi berdasarkan Maklumat No. X Tahun 1945 pada tanggal 16 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Isi Maklumat tersebut menyatakan “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”. Berdasarkan Maklumat tersebut, pada tanggal 22 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) terbentuk.

²⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: 1998.

Badan Pekerja KNIP (BPKNIP) pada tanggal 11 November 1945 mengusulkan kepada Presiden Sukarno agar kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden Soekarno menerima usulan BPKNIP, kemudian Presiden Soekarno pada tanggal 14 November 1945 membubarkan kabinetnya dan sekaligus menjadi perdana menteri. Kebijakan tersebut membawa terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Sistem parlementer yang baru ini, kekuasaan presiden hanya bersifat simbolik, kekuasaan berada ditangan perdana menteri dan para menteri kabinet bertanggung jawab kepada DPR. Hal ini berlangsung sampai dengan keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Pihak yang menolak berpandangan bahwa, kebijakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan sistem Presidensial. Kelompok yang menyetujui beralasan bahwa perubahan dalam sistem kabinet suatu pemerintahan merupakan hal yang biasa dan dapat dibenarkan. Kebijakan perubahan sistem pemerintahan semacam ini pernah terjadi dalam tata negara di Inggris.³⁰ Sikap pemerintah dan BPKNIP tetap melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan, tanpa amandemen UUD 1945, dengan alasan dalam rangka menampung aspirasi berbagai kekuatan politik yang ada di Indonesia.

Kabinet-kabinet pada Demokrasi Parlementer yang berlangsung dari tahun 1949-1959 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1. Kabinet Masa Demokrasi Parlementer³¹

³⁰ Nazaruddin Sjamsuddin dkk, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1998, h.8.11.

³¹ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1962. data juga diperoleh dari perpunas.co.id, diunduh tanggal 30 Maret 2020.

Nama Kabinet	Jumlah Menteri	Dibentuk	Demisioner
Kabinet Sjahrir I	16	1945	1946
Kabinet Sjahrir II	24	1946	1946
Kabinet Sjahrir III	31	1946	1947
Kabinet Amir Sjarifuddin I	31	1947	1947
Kabinet Amir Sjarifuddin II	32	1947	1948
Darurat	11	1948	1949
Kabinet Hatta I	16	1948	1949
Kabinet Hatta II	17	1949	1949
Kabinet RIS	16	1949	1950
Kabinet Susanto	9	1949	1950
Kabinet Halim	13	1950	1950
Kabinet Natsir	16	1950	1951
Kabinet Sukiman-Suwiryo	17	1951	1952
Kabinet Wilopo	16	1952	1953
Kabinet Sastromijoyo I	17	1953	1955
Kabinet Burhanuddin Harahap	20	1955	1956
Kabinet Sastromijoyo II	22	1956	1957
Kabinet Djuanda	26	1957	1959

Presiden Soekarno menjadi Presiden RI, setelah mengeluarkan sebuah Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959. Isi Dekrit Presiden yaitu: (1) menetapkan pembubaran Konstituante; (2) menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; (3) membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah utusan golongan dan daerah; (4) membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Dekrit Presiden ini sebagai solusi atas krisis politik yang terjadi. Dekrit Presiden merupakan dasar berlakunya kembali sistem presidensial dengan Presiden Soekarno sebagai kepala negara dan sebagai Presiden Indonesia.

Pembahasan tentang alasan Presiden Soekarno menggunakan konsep demokrasi terpimpin adalah rakyat dalam melaksanakan kewajibannya arus sejalan dengan presiden. Alasan Presiden Soekarno, demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, dan dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Presiden Soekarno dalam gagasannya tentang demokrasi terpimpin menghendaki kapatuhan rakyat pada pemimpindan mengutamakan rasa persatuan. Merujuk pada konsep Herbert Feith tentang gaya kepemimpinan Presiden Soekarno termasuk presiden yang memiliki gaya kepemimpinan *solidarity maker*. Wakil Presiden

Muhammad Hatta dalam konsep Herbert Feith termasuk pemimpin bergaya administrator, karena mementingkan aspek demokrasi dan pembangunan ekonomi yang rasional. Konsep kepemimpinan Albert Widjaja, Muhammad Hata termasuk pemimpin bergaya aktivism.

Presiden Soekarno semenjak tahun 1959, telah membentuk 8 kali perombakan cabinet, datanya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kabinet Presiden Soekarno 1959-1966

Nama Kabinet	Jumlah Menteri	Dibentuk	Demisioner
Kabinet Kerja I	32	1959	1960
Kabinet Kerja II	39	1960	1962
Kabinet Kerja III	56	1962	1963
Kabinet Kerja IV	61	1963	1964
Kabinet Dwikora I	104	1964	1966
Kabinet Dwikora II	99	1966	1966
Kabinet Dwikora III	35	1966	1966
Kabiniet Ampera I	28	1966	1967

Sumber Olahan: perpusnas.co.id, diunduh tanggal 27 Maret 2020.

Bidang kepartaian, Presiden Soekarno melaksanakan penyederhanaan sistem kepartaian melalui Penpres No. 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian. Partai-partai yang dianggap memenuhi persyaratan yaitu PNI, NU, PKI, Parkindo, Partai katolik, PSII, Perti, Murba, IPKI dan Partindo. Partai Masyumi dan PSI sebelumnya sudah dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Alasannya adalah tokoh-tokoh kedua partai tersebut terlibat mendukung gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Presiden Soekarno menganggap partai politik pada masa Demokrasi Parleментар, terlalu banyak dan harus disederhanakan dan disehatkan. Alasan Presiden Soekarno adalah dalam sejarah Republik Indonesia, Indonesia tidak pernah mencapai kewibawaan dan kestabilan pemerintahan karena adanya model oposisi dalam parlemen. Presiden Soekarno mengemukakan tidak menentang demokrasi, malahan menuju demokrasi yang sebenarnya, yakni demokrasi gotong royong seperti yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang asli. Presiden Soekarno menolak demokrasi model negara-negara di Barat berdasarkan

kebebasan. Akibatnya adalah menimbulkan konflik yang berkepanjangan, sehingga usaha-usaha untuk melaksanakan pembangunan menjadi terabaikan. Presiden Soekarno berpandangan partai politik di Indonesia perlu disederhanakan menjadi beberapa partai atau satu partai.³²

Bidang legislatif, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 melalui Penetapan Presiden (Penpres) No. 3 Tahun 1960 pada tanggal 5 Maret 1960. Penyebabnya adalah perbedaan pendapat antara pemerintah dengan DPR mengenai Penetapan Anggaran Belanja Negara tahun 1960. Pemerintah mengusulkan kepada DPR pengeluaran pemerintah sebesar 44 milyar rupiah, usaha untuk mengatasi kekuarangan penerimaan akan diambil dengan menaikkan pajak. DPR menetapkan pengeluaran sebesar 39 milyar rupiah dan menolak menaikkan pajak. Penyebab lainnya adalah DPR dalam melaksanakan tugasnya tidak memenuhi harapan Presiden Soekarno supaya bekerja atau membantu kebijakan-kebijakan Presiden. Kerjasama antara pemerintah dan DPR tidak memenuhi harapan tersebut disebabkan susunan DPR berdasarkan UUDS 1950 tidak mendukung kebijaksanaan-kebijakan Presiden sehingga dianggap mengambat lancarnya pembangunan.³³

Presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR) berdasarkan Penpres No. 4 Tahun 1960 pada tanggal 24 Juni 1960, kemudian mengangkat anggota-anggota DPR-GR berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 156 Tahun 1960 berjumlah 283 orang. Anggota-anggota DPR-GR berasal dari parta politik yaitu PNI, NU, PKI, Parkindo, Partai katolik, PSII, Perti, Murba, dan Partindo, berjumlah 130 orang. Golongan Karya (ABRI, Tani, Buruh, Alim Ulama, Angkatan 1945, Cendikiawan, Koerasi, Pengusaha Nasional, Veteran, Seniman, dan Wartawan) berjumlah 152 orang dan satu wakil dari Irian

³²Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Vol. I (Panitia Penerbit Di bawah Bendera Revolusi, cetakan ke 2, 1963, h. 283.

³³Bintan R Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988, h, 119.

Barat.³⁴ Pada masa ini Presiden Soekarno mengangkat para pimpinan DPR-GR sebagai Menteri Negara. Ketua DPR-GR diberi kedudukan sebagai Menteri Koordinator (Menko) dan wakil Ketua DPR berkedudukan sebagai Menteri.³⁵

Presiden Soekarno membentuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 14 Tahun 1960 tentang Tata Tertib DPR-GR. Tata tertib DPR-GR diatur, Presiden memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan, apabila kata mufakat tidak tercapai di internal DPR-GR. Kewenangan Presiden ini sebagaimana terdapat pada Perpres asal 103 yang menyatakan: (1) Keputusan sedapat mungkin dilakukan dengan kata mufakat; (2) Jika Kata mufakat termaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Presiden; (3) Presiden mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud pada Ayat (2) pasal ini.

Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) berdasarkan Penpres No. 2 Tahun 1959. Keanggotaan MPRS ditetapkan berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 1959. Rekrutmen anggota-anggota MPRS melalui mekanisme pengangkatan oleh Presiden Soekarno. Anggota MPRS berjumlah 603 orang terdiri dari anggota DPR-GR sebanyak 283 orang, Utusan daerah sebanyak 94 orang, wakil Golongan Karya sebanyak 232 orang. Presiden Soekarno memberi predikat pimpinan MPRS sebagai menteri.³⁶

Bidang yudikatif, Presiden Soekarno memberikan status Menteri kepada Ketua Mahkamah Agung (MA). Presiden Soekarno memiliki kewenangan untuk mencapuri keputusan-keputusan pengadilan. Kewenangan Presiden ini diatur melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 19 Tahun 1964). Pasal 19 UU No 19 tahun 1964 dimaksud

³⁴Nazaruddin Sjamsuddin dkk, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1998, h.7.23.

³⁵Bintan Saragih, *Op.cit*, h. 119.

³⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1981, h. 2002.

menyatakan” Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang mendesak, presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal pengadilan.” Hal ini diperkuat dengan penjelasan umum dalam undang-undang tersebut yang menyatakan: “Trias politika tidak mempunyai tempat sama sekali dalam Hukum Nasional Indonesia.

Kebijakan Presiden Soekarno dalam menyelenggarakan kekuasaan mengendalikan peran partai politik, peran DPR, peran MPR, dan mengatur peran kekuasaan Mahkamah Agung. hendak menegakkan kewibawaan pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut memperlihatkan, Presiden Soekarno dalam menjalankan kekuasaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat dimasukan ke dalam persiden yang memiliki gaya kepemimpinan legitimasi dalam konsep Albert Widjaya, karena menghendaki lembaga-lembaga negara ikut saja keinginan pemimpin, atau konsep kepemimpinan solidarity maker dalam konsep Herbert Feith, Presiden Soekarno mengutamakan persatuan dan mengedepankan simbolis.

Kepemimpinan Presiden Soekarno bersifat demokratis-responsif Ketika merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Presiden Soekarno dalam gagasan Presiden Soekarno, sila persatuan Indonesia ditempatkan pada sila pertama, diikuti sila kerakyatan dan sila ketuhanan pada bagian akhir. Setelah melalui musyawarah dengan anggota PPKI, Presiden Soekarno menyetujui sila ketuhan yang maha esa menjadi sila pertama, kemudian ditetapkan menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Situasi perubahan kepemimpinan Soekarno cenderung demokratis-adaptif, ketika memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPRS. Perubahan sikap ini terjadi, karena kuatnya tekanan masyarakat yang dimotori mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang menuntut Presiden Soekarno diadili atas terjadinya kasus pembunuhan dalam kasus G.30. S/PKI. Tekanan kepada Presiden Soekarno ini didukung oleh situasi krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia.

Faktor utama yang mempengaruhi kepemimpinan Presiden Soekarno bergaya *solidarity maker* adalah faktor budaya dan faktor latar belakang situasi politik. Presiden Soekarno merupakan Masyarakat Jawa yang memiliki budaya kekuasaan. Faktor latar belakang politik berkaitan situasi yang berkembang semasa demokrasi parlementer.

Tradisi Jawa berkaitan dengan konsep *kawula-gusti* atau hubungan raja dan kaula atau rakyat. Konsep ini tidak hanya menunjukkan hubungan yang tinggi dengan yang rendah, tapi lebih menunjukkan saling tergantung yang erat antara unsur yang berbeda namun tak terpisahkan, dua unsur dari hal yang sama.³⁷ Pemikiran Jawa tentang hubungan raja dengan kaulanya meliputi tiga konsep pokok yaitu: (1) hubungan pribadi yang akrab yang disertai oleh perasaan saling mengasihi dan menghormati dianggap sebagai pola atau model baku dalam komunikasi sosial. (2) Takdir menetapkan kedudukan manusia dalam masyarakat apakah ia dilahirkan sebagai abdi atau tuan. Akibatnya ialah manusia tidak punya pilihan lain kecuali melakukan kewajibannya seperti yang telah ditentukan oleh takdir. Kedua faktor ini menghasilkan suatu jenis praktek pemerintahan. (3) dalam praktek pemerintahan, penguasa dan para pejabatnya, dari segi kebijaksanaan pemerintahan praktis, harus memperhatikan para warganya seperti seorang orang tua mengasuh anak-anaknya. Dengan demikian sesungguhnya sang penguasa memiliki sikap keunggulan yang melindungi, sedangkan yang diperintah memiliki sikap pengabdian yang tulus.³⁸ Tradisi nilai budaya Masyarakat Jawa ini terlihat dalam gagasan Presiden Soekarno tentang konsep Demokrasi Terpimpin. Presiden Soekarno menerangkan konsep Demokrasi Terpimpin dengan analogi suatu konser musik:

“...satu konser mempunyai seorang dirigen, yang konsernya terdiri dari banyak orang. Yang satu memegang biola, yang satu memegang gitar, yang

³⁷ Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina-Negara Di Jawa Masa Lampau Studi Tentang Mataram II*, Abad XVI sampai XIX, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985, h. 25.

³⁸ *Ibid*, h. 31-32.

satu memegang rombone, yang satu memegang trompet, yang satu memegang ting-ting, yang satu memegang jidor, dan lainnya. Meskipun bermacam-macam alat, tapi oleh karena ada pimpinan, pertama pimpinan dari pada satu lembaran kertas, apa namanya noot, bahasa Indonesianya not. Misalnya lagu *Blaue Donau* oleh Johann Strauss, sudah nyata lagunya itu dari not ini. Kemudian dirigen sebagai pemimpin yang memimpin orkes itu yang terdiri dari pada puluhan bahkan ratusan orang, keluarlah satu suara yang merdu yang berirama, dan harmonis. Kertas not ini di dalam Demokrasi Terpimpin inilah *blue-print*. Dalam kehidupan negara disebutnya pola pembangunan yang dibuat oleh Dewan Perancang Nasional, disingkat DPN. Penyelenggara pola ini masyarakat yang terdiri dari tenaga-tenaga fungsional, menyelenggarakan pola ini bersama-sama di dalam satu irama yang merdu sehingga terselenggaralah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sebagai mana tertulis di dalam Undang-Undang pembentukan DPN. Bertindak sebagai pemimpin atau dirigennya yang mengatur semua irama tersebut tidak harus bernama Soekarno, bisa juga yang lain.”³⁹

Konsepsi Demokrasi Terpimpin dapat dilacak dari berbagai ide dan pemikiran Presiden Soekarno. Karena ide dasar konsep Demokrasi Terpimpin berasal dari pemikirannya. Menurut Presiden Soekarno.

“Sila Kedaulatan rakyat adalah tehnis kedaulatan rakyat atau dalam bahasa asing *democratie*. Demokrasi dalam pengertian sekedar satu alat untuk mencapai suatu tujuan. Teknis tujuannya ialah suatu masyarakat yang berbentuk suatu hal. Jikalau tujuan sudah ditentukan, maka salah satu alat untuk mencapai masyarakat itu adalah demokrasi. Untuk mencapai masyarakat yang didam-idamkan bukan hanya demokrasi, tapi ada nasional sosialisme, dan lainnya. Demokrasi yang akan dijalankan di Indonesia bukan demokrasi dari Eropa Barat atau dari Amerika. Demokrasi Indonesia adalah Demokrasi Tepimpin.⁴⁰ (Sukarno, 1984; 91)

“Demokrasi adalah suatu ideologi politik dari pada salah satu periode, satu bukti bahwa kesadaran manusia, sebab demokrasi adalah satu alam pikiran, alam pikiran politik, bahwa alam pikiran ini adalah terbuat oleh suatu cara produksi di dalam suatu periode. Artinya, bahwa dalam suatu periode yang

³⁹ Sukarno, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno, 1984, h. 123.

⁴⁰ *Ibid*, h. 91.

cara produksinya belum membutuhkan *parlementaire democratie*, belum timbul pemikiran *parlementaire democratie* itu. Orang belum membutuhkan demokrasi-demokrasian, orang senang dengan cara feodal yang tidak ada parlemen-parlemen. Cuma *sabda pandita ratu* terserah kepada raja, raja yang membuat hukum, raja yang menentukan sesuatu. Masyarakat ketika itu semuanya tergantung kepada raja. Oleh karena itu demokrasi yang kita jalankan adalah demokrasi Indonesia, membawa kepribadian Indonesia sendiri. Demokrasi bagi Indonesia bukan sekedar alat teknis, tapi suatu alam jiwa pemikiran dan perasaan Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus bisa meletakkan alam jiwa dan pemikiran bangsa kita itu di atas kepribadian bangsa sendiri, di atas penyelenggaraan cita-cita satu masyarakat yang adil dan makmur yang sudah jelas tidak bisa dengan demokrasi cara ini. Oleh karena itu Demokrasi Indonesia yang akan dijalankan adalah Demokrasi Terpimpin.⁴¹

Presiden Soekarno mengemukakan dua prinsip pokok dalam membangun Demokrasi Terpimpin dalam kehidupan politik yaitu, pertama, mengenai masalah kabinet yang dinamakan kabinet gotong-royong. Kedua, Dewan Nasional. Kabinet Gotong-royong merupakan kabinet yang duduk daripada semua-fraksi-fraksi atau parai-partai di dalam parlemen hendaknya duduk di dalam parlemen. Semua partai dan fraksi yang ada di parlemen apakah dia Masyumi, PKI, NU, PNI, PKI, Katolik dan semua partai kecil sekalipun yang ada dalam parlemen diberi hak duduk dalam kabinet untuk menjadi menteri Kabinet untuk mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden. Menurut Soekarno dengan kabinet gotong-royong yang demikian, maka hilanglah apa yang dinamakan oposisi yang sudah berjalan selama masa demokrasi parlementer. Dengan bentuk kabinet yang seperti itu, musyawarah dengan kekeluargaan dapat berjalan dengan suasana gotong -royong, dengan sendirinya oposisi yang pernah ada sebelumnya akan lenyap dengan sendirinya. Menurut Soekarno perbedaan pendapat sesuatu yang wajar, akan tetapi tidak berarti berusaha menjatuhkan kabinet.⁴²

⁴¹ *Ibid*, h. 105-107.

⁴² Feith, Herbert & Lance Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988. h. 105-108

Dewan Nasional adalah suatu badan yang di dalamnya meliputi segenap bangsa Indonesia dengan tiada memandang dari mana asal golongan itu. Dewan Nasional ini anggota-anggotanya terutama sekali ialah wakil atau orang-orang pada golongan fungsional dalam masyarakat Indonesia yaitu, golongan cendekiawan, golongan pengusaha, wakil golongan katolik, wakil golongan protestan, wakil golongan ulama, wakil golongan wanita, wakil golongan yang mempersoalkan masalah daerah, Kepala staf Angkatan Darat, Kepala staf Angkatan Udara, Kepala Staf , Jaksa Agung, beberapa Menteri yang penting, Angkatan Laut, Dan kepala Kepolisian dan Dewan Nasional ini akan dipimpin langsung oleh Presiden. Fungsi Dewan Nasional adalah memberi nasehat kepada kabinet, nasehat yang diminta atau tidak diminta, oleh karena dewan nasional ini tersusun dari orang-orang atau wakil-wakil atau golongan-golongan yang fungsional di dalam masyarakat. Sebagai kabinet adalah pencerminan dari pada parlemen, parlemen laksana diperas menjadi kabinet, Dewan Nasional dan kabinet berdiri berdampingan di dalam kabinet. Dewan Nasional dipimpin oleh Presiden.⁴³

Ungkapan Presiden Soekarno tersebut mengisyaratkan tentang lingkungan politik yang mempengaruhi kepemimpinannya yakni Demokrasi Parlementer yang berlangsung di Indonesia tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Demokrasi yang berlangsung pada masa Demokrasi Parlementer adalah demokrasi negara asing. Praktek politik yang berlangsung selama Demokrasi Parlementer menimbulkan konflik antar elite-elite partai, tercermin silih gantinya kabinet pada masa itu. Konsekwensi pembangunan yang berkelanjutan menjadi terhambat. Faktor yang lebih kuat adalah faktor budaya Masyarakat Jawa yang melekat pada diri Presiden Soekarno.

Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan responnya terhadap kebijakan Presiden Soekarno melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Menurut Hatta:

⁴³ *Ibid*, 1988. h. 107.

“tindakan Presiden Soekarno membubarkan konstituante yang dipilih oleh rakyat dan mengeluarkan suatu Dekrit untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan merupakan suatu tindakan kudeta. Alasan yang dikemukakan Hatta adalah, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden adalah kepala eksekutif, Parlemen yang ada menurut Undang-Undang dasar 1950 dan tersusun menurut Pemilihan Umum pada tahun 1955 diakui sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Sementara sampai terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian tindakan Presiden Soekarno membubarkan konstituante merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi.”⁴⁴

Menurut Hatta:

“...dengan perubahan Dewan Perwakilan Rakyat yang terjadi dimana semua anggota ditunjuk oleh Presiden, hanyalah sisa-sisa demokrasi yang penghabisan. Demokrasi Terpimpin Soekarno menjadi suatu yang didukung oleh golongan-golongan yang tertentu. Ini adalah perkembangan politik dimana demokrasi berakhir dengan anarki dan membuka jalan bagi diktatur. Sejarah dunia memberikan petunjuk pula bahwa diktatur yang bergantung

pada kewibawaan orang seorang tidak lama umurnya. Sebab itu pula sistem Demokrasi Terpimpin yang dilahirkan Soekarno itu tidak akan lebih panjang umurnya dari Soekarno sendiri. Apabila Soekarno tidak ada lagi, maka sistemnya akan rubuh dengan sendirinya seperti rumah dari kartu. Tidak ada seorangpun yang mempunyai kaliber dan kewibawaan untuk meneruskannya.”⁴⁵

“Soekarno mengganti demokrasi liberal dengan apa yang disebutnya dengan istilah Demokrasi Terpimpin, yakni suatu cara kerja yang melaksanakan suatu program pembangunan yang direncanakan dengan suatu tindakan yang kuat di bawah suatu pimpinan. Titik berat dari pada pemerintahan tidak lagi terletak pada Parlemen, melainkan pada dua badan baru yaitu Dewan Nasional, yang sekarang berubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perancang Nasional. Dalam sistem ini Dewan Perwakilan Rakyat tugas hanya memberikan dasar hukum saja kepada keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau usul dari dua badan tersebut tadi. Dengan cara begitu, segala perundingan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat dapat berlaku dengan cepat, tiada bertele-tele. Dewan Pertimbangan Agung dan

⁴⁴ Mohammad Hatta, “Demokrasi Kita” dalam Mohammad Hatta, *Kumpulan Pidato*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1981, h. 109-110

⁴⁵ *Ibid*, h. 117.

Dewan Perancang Nasional susunannya ditentukan oleh Presiden Soekarno. Pertanyaan yang muncul adalah tercapaiah atau tidakkah kemakmuran rakyat dengan itu, sanggupkah ia menahan taraf kemerosotan taraf hidup rakyat dalam tempo yang singkat? Dapatkah ia menyetop inflasi yang terus menerus dalam waktu yang tidak terlalu lama, inflasi yang membawa putus harapan?”⁴⁶

Presiden Soekarno tetap jalan dengan sejumlah gagasannya, meskipun respon datang Mohammad Hatta dan reaksi dari pihak lainnya, hal ini membuktikan Presiden Soekarno kurang respon dengan peikiran dan gagasan dari luar dirinya.

B. Kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998)

MPRS menetapkan Jenderal Soeharto sebagai presiden melalui Tap MPRS No. XLIV tahun 1968 yang menyatakan “Mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilu”.

Presiden Soeharto semenjak menjadi Presiden RI dari tahun 1967, membentuk sejumlah kabinet yaitu Kabinet Ampera II tahun 1967, Kabinet Kabinet Pembangunan I, Kabinet Pembangunan II yang terbentuk setelah Pemilu 1971, Kabinet Pembangunan III terbentuk setelah Pemilu 1977, Kabinet Pembangunan IV terbentuk setelah Pemilu 1982, Kabinet Pembngunan V terbentuk setelah Pemilu 1987, dan Kabinet Pembangunan VI dibentuk setelah Pemilu 1992. Kabinet Pembangunan VII dibentuk setelah Pemilu 1997, yang terakhir ini hanya berumur 1 (satu) tahun karena Presiden Soeharto lengser dari jabatannya, akibat tekanan kelompok reformasi.

Tabel 3. Kabinet Presiden Soeharto 1967-1998

Nama Kabinet	Jumlah Menteri	Dibentuk	Demisioner
Kabinet Ampera II	24	1967	1968
Kabinet Pembangunan I	24	1968	1973
Kabinet Pembangunan II	24	1973	1978

⁴⁶ *Ibid*, h. 118.

Kabinet Pembangunan III	32	1978	1982
Kabinet Pembangunan IV	42	1982	1987
Kabinet Pembangunan V	44	1987	1992
Kabinet Pembangunan VI	43	1992	1997
Kabinet Pembangunan VII	38	1997	1998

Kepemimpinan Presiden Soeharto mengendalikan partai politik dengan melakukan penataan terhadap partai politik. Penataan partai politik diawali dengan membubarkan PKI dan Partindo. PKI dianggap terlibat dalam peristiwa G30S/PKI dan Partindo dianggap ikut mendukungnya. Pada Pemilu tahun 1971 terdapat 10 partai politik yang ikut sebagai peserta Pemilu, yaitu Sekber Golkar (partai pemerintah), NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Partai katolik, Perti, IPKI dan Murba. Partai memperoleh kursi di DPR hanya 2 yaitu IPKI dan Murba.

Pengendalian partai politik terus berlanjut, pada tahun 1975 melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (UU No. 3/1975). Partai politik pada tahun 1973 mengalami penggabungan dari beberapa partai menjadi satu, yang dikenal dengan istilah fusi partai politik. Partai politik yang ada difusikan menjadi 3 partai politik yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Golkar merupakan gabungan golongan fungsional dan menjadi partai pemerintah. PPP merupakan gabungan partai NU, Parmusi, PSII dan Perti disebut kelompok Persatuan Pembangunan atau partai-partai spritual-materialis. PDI merupakan gabungan PNI, IPKI, Murba, Parkindo dan Partai katolik disebut kelompok Demokrasi Pembangunan atau materialis-spiritualis. Kemudian hasil fusi partai ini kelompok partai Islam bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai nasionalis dan partai agama non-Islam bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pengaturan partai politik ini di tuangkan dalam UU No 3/1975.

Pada Pemilu 1971 Jumlah partai politik yang ikut sebagai peserta Pemilu berjumlah 10 partai politik yaitu Golkar, PNI, Parmusi, NU, Parkindo, Partai

Katolik, IPKI, Murba, PSII, Perti. Partai politik yang ada, dapat dikelompokkan berdasarkan ideologi. Partai Nasionalis terwakili pada PNI, Murba, IPKI. Partai politik berideologi nasionalis-moderat diwakili Golkar, partai politik Islamis-modernis diwakili Parmusi, partai berideologi Islamis-konservatif diwakili NU, Perti, dan PSII. Partai non-Islam diwakili Parkindo dan partai Katolik.

Kewenanga pembubaran partai politik pada masa Demokrasi Pancasila, bukan merupakan kekuasaan rakyat melalui Pemilu, kekuasaan pembubaran partai beralih kepada Presiden, sebagaimana tertuang dalam UU No. 3/1975 Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan “Dengan kewenangan yang ada padanya, Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat membekukan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang ternyata melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 7 a dan Undang-undang ini.”

Partai politik pada masa ini hanya memiliki pengurus sampai tingkat Kabupaten/Kota. Kebijakan ini tercantum dalam UU No3/1975 Pasal 10 Ayat (1) dan (2). Ayat (1) menyatakan “Partai Politik dan Golongan Karya mempunyai kepengurusan di : a. Ibukota Negara Republik Indonesia untuk Tingkat Pusat; b.Ibukota Propinsi untuk Daerah Tingkat I; c.Ibukota Kabupaten/Kotamadya untuk Daerah Tingkat II; di tiap kota Kecamatan dan Desa ada/dapat ditetapkan seorang Komisaris sebagai pelaksana Pengurus Daerah Tingkat II. Komisaris dibantu oleh beberapa pembantu.” Ayat (2) menyatakan “Kepengurusan untuk Daerah

Administratif di lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan lainnya dipersamakan dengan Daerah Tingkat II sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.” Kebijakan Presiden Soeharto ini dikenal dengan istilah massa mengambang (*floating mass*). Kebijakan ini memotong hubungan partai politik dengan massa pendukung partai politik di pedesaan. Partai politik pada masa Pemilu sebelumnya memiliki basis massa di daerah pedesaan. Kebijakan ini sangat memberikan keuntungan pada Golkar, partai ini memiliki jaringan birokrasi sampai

ke Desa. Pengalaman menunjukkan Golkar memanfaatkan Lurah/Kepala Desa untuk memobilisasi masyarakat pedesaan untuk memilih Golkar pada setiap Pemilu.

Presiden Soeharto melanjutkan pengendalian partai politik, pada tahun 1985, partai politik ini memiliki ideologi yang sama yakni Pancasila, yang dikenal dengan istilah asas tunggal partai. Asas tunggal partai pada masa ini tercantum dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (UU No 3/1985) Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Ayat (1) menyatakan “Partai Politik dan Golongan Karya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ayat (2) menyatakan “Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Ideologi partai politik yang tersisa adalah nasionalis-moderat, karena partai politik memiliki asas yang sama. Kondisi partai politik pada masa Demokrasi Pancasila kehilangan identitasnya yang memiliki ragam ideologi.

Pemerintah dalam prakteknya mengintervensi terutama PPP dan PDI selalu mengalami intervensi dari pemerintah pada setiap Musyawarah Nasional (Munas) yang dilaksanakan kedua partai tersebut. Izin pelaksanaan Munas akan dikeluarkan oleh Panglima Daerah Militer (Pangdam) apabila calon-calon yang akan muncul dipastikan bukan tokoh yang kritis terhadap pemerintah. Ketua partai PPP dan PDI yang muncul pada masa Munas partai adalah tokoh yang selalu memperoleh restu dari Presiden Soeharto. Intervensi pemerintah ini biasanya melalui jaringan ABRI

Pemerintah mengintervensi calon-calon anggota DPR dari PPP dan PDI setiap Pemilu. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, harus melalui seleksi khusus yang dikenal dengan istilah Penelitian khusus (Litsus). Proses Litsus calon-calon anggota DPR dan DPRD dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri dan Mabes ABRI. Calon usulan PPP dan PDI yang diterima biasanya mereka yang memiliki rekam jejak yang akomodatif terhadap pemerintah. Calon

anggota DPR dan DPRD yang pernah bersikap kritis kepada pemerintah, tidak akan pernah lolos menjadi calon DPR.

Presiden Soeharto menggunakan Golkar sebagai sarana legitimasi politiknya. Tujuannya adalah untuk memperoleh suara mayoritas rakyat dalam Pemilu. Presiden Soeharto dalam struktur organisasi Golkar menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pembina yang memiliki kekuasaan tertinggi organisasi. Ketua Dewan Pembina memiliki kekuasaan khusus dalam organisasi antara lain adalah membatalkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar dan dapat menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Luar Biasa. Ketua Dewan Pembina dalam prakteknya yang mengendalikan Golkar sepenuhnya, sementara DPP hanya sebatas menjalankan instruksi ketua Dewan Pembina. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, gubernur dan bupati/walikota bertindak sebagai Ketua Dewan Penasehat untuk tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi dan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota. Golkar selama Pemilu Orde Baru, keluar sebagai pemenang dalam Raihan suara pemilih.

Tabel 4. Partai Politik Berdasarkan Perolehan Suara Pemilu 1971

Partai	Perolehan Sura Pemilu
1. Golkar	62,82 %
2. PNI	6,93 %
3. Parmusi	5,36 %
4. NU	18,68 %
5. Parkindo	1,4 %
6. Katolik	1,10 %
7. Perti	0,69 %
8. IPKI	0,61 %
9. Murba	0,08 %
10. PSII	2,39 %

Sumber: Diolah

Tabel 5. Perolehan Suara Golakar Pemilu 1977 - 1997

	Golkar	PPP	PDI
1. Pemilu 1977	62,11 %	29,29%	8,6 %
2. Pemilu 1982	64,34%	27,78 %	7,88 %
3. Pemilu 1987	72,16 %	15,97 %	10,87 %
4. Pemilu 1992	60,1 %	17 %	14,89
5. Pemilu 1997	74,51 %	22,43 %	3 %

Sumber: Diolah

Presiden Soeharto menjadikan Golkar sebagai sarana memperoleh uang. Keuangan Golkar dikelola dalam bentuk yayasan yang terkenal adalah Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (Dakab) yang didirikan pada bulan Juli 1985. Yayasan Dakab diketua oleh Presiden Soeharto dan dibantu oleh Bambang Trihatmodjo sebagai sekretaris dan Hutomo Mandala Putra sebagai bendahara. Tujuan didirikannya Yayasan Dakab adalah untuk mendukung pendanaan Golkar, terutama untuk pemenangan Pemilu dan dana untuk perjuangan Golkar membela dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.

Sumber dana Dakab berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terutama Pertamina, Pengusaha (Cukong).⁴⁷ Sumber lainnya keuangan Dakab berasal dari internal Golkar yaitu dari pegawai negeri sipil dan anggota Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) DPR, F-KP DPRD I, dan F-KP DPRD II. Besaran sumbangan masing kelompok tersebut dapat dilihat pada tabel.

Tabel 6. Sumber Uang Internal Golkar⁴⁸

Sumber	Besaran
PNS Golongan I	Rp 5000
PNS Golongan II	Rp 8000
PNS Golongan III	Rp 12.000
PNS Golongan IV	Rp 30.000
F-KP DPR	RP 750.000
F-KP DPRD I	Rp 600.000
FKP II	Rp 300.000

Kekuasaan peneglolahan dana Yayasan Dakab berada di tangan Presiden Soeharto. Pengelolaan dana tidak dilakukan secara eksklusif dan tidak transparan. Jumlah keuangan dan penggunaan keuangan Yayasan Dakab hanya diketahui oleh Presiden Soeharto dan anaknya Hutomo Mandala Putra yang menjadi bendahara.

⁴⁷ Akbar Tandjung, *The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Tubulensi Politik Era Transisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, h. 178.

⁴⁸ *Ibid*, h. 173.

Dana Dakab selain digunakan untuk kepentingan organisasi Golkar, juga digunakan untuk biaya-biaya politik khusus yang ditentukan oleh Presiden Soeharto.

Kekuasaan Presiden Soeharto mengendalikan MPR/DPR melalui F-Golkar dan D-ABRI. Kebijakan MPR/DPR selama Orde Baru selalu selaras dengan kehendaknya. Hal ini dimungkinkan karena Golkar selama Pemilu masa Orde Baru yaitu Pemilu 1971-Pemilu 1997 meraih suara rata-rata 50,60 % kursi di DPR. FPP dan FPDIP memperoleh masing-masing sebesar 19 % dan sebesar 7,33 %, apabila dijumlahkan kedua fraksi ini hanya berjumlah 26,33%. Kekuatan FKP ditambah dengan F ABRI sebesar 20 %. Sebagaimana diketahui anggota FABRI di DPR ditunjuk oleh Presiden Soeharto dan merupakan komponen dari organisasi Golkar.

Tabel 7. Peta Kekuatan DPR 1971-1997

Pemilu Tahun	F-KP	F-PP	F-PDIP	F-ABRI	Jumlah
1971	230 (50)	94 (20,44)	30 (6,52)	100 (21,74)	460 (100)
1977	232 (50,43)	99 (21,52)	29 (6,30)	100 (21,74)	460 (100)
1982	246 (53, 48)	94 (20, 43)	24 (5,22)	100 (21, 74)	460 (100)
1987	299 (59,80)	61 (12,20)	40 (8,00)	100 (20)	500 (100)
1992	282 (56,40)	62 (12,40)	56 (11,20)	100 (20)	500 (100)
1997	325 (65)	89 (17,80)	11 (2,20)	75 (15)	500 (100)

Sumber Olahan: DPR RI, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi.

Data tersebut memberikan gambaran, Golkar merupakan mayoritas mutlak di DPR. Komposisi DPR yang demikian, dijadikan sarana legitimasi oleh Presiden Soeharto melaksanakan berbagai kebijakannya dalam bentuk Undang-Undang sesuai dengan kehendak Presiden Soeharto. Sejumlah Undang-Undang yang lahir pada masa ini seperti UU Keparitaan, Undang Pemplu dan lainnya merupakan bagian dari politik Presiden Soeharto.

Tabel 8. Peta Kekuatan MPR 1971-1997

Periode	FPP	FKP	FPDIP	FABRI	FUD	N
71-77	14,13	43,59	4,67	25,00	12,60	100
77-82	14,38	41, 73	4,24	25,00	14,68	100
82-87	13,37	43,04	3,48	25,00	15,21	100
87-92	9,30	54,80	6,10	15,10	14,70	100

92-97	9,30	54,80	6,10	15,10	20,49	100
97-99	13,40	48,80	1,60	11,30	20,49	100
% rata-rata	12,30	45,73	4,75	24,40	16,32	100

Komposisi kekuatan politik di MPR yaitu FPP, FKP FPDIP, FABRI, dan Fraksi Utusan Daerah (FUD) di MPR seperti pada tabel tersebut di atas, terlihat rata kekuatan FKP rata-rata mencapai 45,73 %, sementara FPP rata-rata mencapai 12,30 %, FPDP rata-rata 4,75 %, kalau dijumlahkan menjadi 17,5%. kekuatan FKP ini didukung oleh kekuatan FABRI dan FUD masing-masing 24,40 % dan 16, 32 %. Kekuatan FKP di MPR sebesar 45,73 % +24,40 % +16,32 % = 96,19 %. Sebagaimana diketahui anggota FABRI dan anggota FUD MPR diangkat oleh Presiden Soeharto. MPR dijadikan sarana legitimasi oleh Presiden Soeharto untuk terpilih menjadi Presiden. Fungsi MPR salah satunya adalah memilih presiden dan wakil presiden. Komposisi MPR yang demikian sudah jelas akan memilih Presiden Soeharto menjadi Presiden RI.

Kepemimpinan Presiden Soeharto bergaya otoriter-represif terlihat dalam menangani kelompok separatis khusus Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menjalankan pendekatan militer dan represif, dengan menjadikan wilayah Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). GAM lahir pada tanggal 4 Desember 1976 lahir gerakan separatisme dari sekelompok masyarakat di Aceh. Pemimpinnya adalah Teungku Hasan M. Di Tiro (Hasan Tiro). GAM menghendaki Aceh sebagai suatu daerah yang merdeka. Munculnya GAM ini didasari ketidakpuasan terhadap perlakuan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Aceh. Pemerintah pusat dianggap tidak memiliki kesungguhan dalam pembangunan Aceh, pada hal Aceh memiliki sumber daya alam yang cukup yang salah satunya adalah *Liquified Natural Gas* (LNG) di Aceh Utara.⁴⁹

⁴⁹ Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 119.

Presiden Soeharto mengendalikan MA secara tidak langsung, yakni melalui F-KP dan F-ABRI. Pencalonan Ketua MA berasal usulan DPR sebanyak 3 orang, kemudian salah satu diantaranya dipilih dan ditetapkan Presiden. Proses usulan DPR inilah Presiden Soeharto memiliki kewenangan menentukannya, karena jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar yang memiliki kewenangan tertinggi organisasi.

Kepemimpinan Presiden Soeharto bergaya demokratis-responsif, ketika tekanan kelompok pro-reformasi yang dimotori mahasiswa menuntut Presiden Soeharto mundur jabatannya, yang dianggap tidak mampu untuk mengatasi krisis ekonomi dan krisis politik. Tekanan kelompok pro-reformasi ini didukung oleh MPR/DPR. Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden pada tahun 1998. Posisinya digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998.

Penjelasan tersebut di atas, memberikan gambaran kepemimpinan Presiden Soeharto mengendalikan politik Indonesia secara sentralisasi, dengan kekuasaan puncak berada di tangannya, tanpa ada satu kekuatanpun yang mampu mengorolnya. Kepemimpinan Presiden Soeharto dalam menjalankan kekuasaan cenderung bergaya *solidarity maker* dalam konsep Herberth Feith, karena mengutamakan persatuan bangsa, dan pembangunan bangsa dalam arti luas, sebagaimana dikatakannya dalam membahas konsepsinya tentang partai politik dan Pancasila khususnya sila persatuan Indonesia dan sila kerakyatan:

“partai politik merupakan wadah penyaluran aspirasi-aspirasi rakyat dan sarana pembinaan kesadaran politik masyarakat. Partai politik dan organisasi sosial politik lainnya harus mempunyai semangat dan berorientasi kepada pembangunan bangsa. Partai politik bukan sekedar alat untuk memperoleh pengikut sebanyak-banyaknya, bukan sekedar alat memenangkan Pemilu, bukan sekedar alat untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan.”⁵⁰

⁵⁰ Krissantono (ed), *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS, 1976, h. 65-67.

“Sila persatuan, merupakan pedoman bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap mempertimbangkan kepentingan persatuan bangsa dalam setiap kebijakan dan perilaku kelompok dalam masyarakat. Karena bangsa Indonesia bersifat majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Bangsa ini bersatu karena ada kesepakatan bangsa Indonesia untuk berhimpun menjadi satu bangsa yakni bangsa Indonesia. Persatuan bukan berarti menghilangkan keragaman rakyat Indonesia, bersatu memupuk persamaan dan mengurangi perbedaan-perbedaan yang muncul. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan perwakilan. Sila ini pada dasarnya adalah demokrasi. Dalam pengambilan keputusan dalam semua tingkatan baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan harus melalui sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia adalah Musyawarah dan Mufakat. Apabila proses Musyawarah mufakat tidak tercapai, jalan kedua yang ditempuh adalah *voting*. Apabila sudah melakukan *voting*, apapun keputusannya semua harus menerima dan mematuhi hasilnya. Karena pelaksanaan *voting*, merupakan hasil kesepakatan bersama.”⁵¹

Ungkapan Presiden Soeharto tersebut di atas mengisyaratkan bahwa dalam memerintah mengutamakan simbol. Makna lainnya yang tersirat dalam ungkapan Presiden Soeharto tersebut adalah bahwa partai politik seperti itulah yang hendak dibangun Presiden Soeharto sebagai pemimpin dan rakyat seharusnya mengikuti saja kehendak pemimpinnya. Konsep kepemimpinan Herberth Feith tentang kepemimpinan Solidarity maker masih relevan untuk menjelaskan kepemimpinan Presiden Soeharto, yakni berorientasi pada pembangunan kewibawaan pemerintah (*legitimation*), rakyat harus punya kesan positif dan patuh pada pemerintah.

Varibel lingkungan yang mempengaruhi kepemimpinan Presiden Soeharto adalah latar belakang budayanya yang berasal dari Masyarakat Jawa, dimana nilai-nilai budaya Jawa melekat dalam kehidupannya. Masyarakat Jawa menghendaki pentingnya rakyat patuh pada pemimpin, karena keberadaannya merupakan sebuah takdir. Budaya Masyarakat Jawa menghendaki keharmonisan, ketentraman atau stabilitas dalam pemerintahan.

⁵¹ *Ibid.*

Varibel lainnya adalah latar belakang karir Presiden Soeharto yang berprofesi sebagai tantara. Organisasi tantara pada dasarnya bersifat hirarki dan komando tertinggi berada di tangan panglimanya, dan pada level bawah kekuasaan tertinggi berada pada komandan pada semua level. Sebagai anggota, organisasi tantara menghendaki anggota patuh pada perintah atasan. Jabatan terakhir Presiden Soeharto sebelum jadi tantara Palima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) berpangkat MaYor Jenderal (Mayjend).

Vaiabel pendukung adalah situasi politik dan ekonomi pada saat menjadi presiden, dihadapkan pada kondisi Indonesia krisis ekonomi yang cukup parah. Bidang politik, konflik politik terus berlangsung terutama kelompok masyarakat yang anti PKI. Variabel ini merupakan faktor pendukung gaya kepemimpinan Presiden Soeharto yang mengutamakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi membutuhkan persatuan bangsa untuk mengatasinya, karena hanya dengan cara itu pembangunan bangsa di segala bidang kehidupan bisa dilaksanakan.

C. Kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi pada Pemilu tahun 2004 dan pemilu tahun 2009 melalui pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung. Pemilu tahun 2004, Pasangan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono/Yusuf Kala berhasil meraih 33,58 % suara pemilih, sementara pasangan lainnya Megawati Soekarnoputri/Hasyim Muzadi meraih 26,24 % pada puran Pemilu kedua. Pada Pemilu 2009, Pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono/Budiono Kembali terpilih menjadi presiden dengan Raihan suara sebesar 60,80 %, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri/Prabowo Subianto hanya meraih suara sebesar 26,79 %

suara pemilih. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam membangun kabinet tahun 2004 dan 2009 membentuk kabinet berkoalisi dengan partai pendukung.⁵²

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam membangun kabinet pada tahun 2004 dan 2009, membentuk kabinet koalisi dengan sejumlah partai politik pendukung. Partai yang tergabung dengan koalisi dan kekuatan koalisi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dilihat dari perelahan kursi di DPR tahun 2004 dan 2009 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Partai Koalisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 dan 2009

Partai Koalisi	Kursi 2004	Kursi 2009
PD (pendukung utama)	56	149
Partai Golkar	127	106
PPP	58	37
PAN	53	46
PKB	52	28
PBB	11	-
PKS	45	57
PKPI	1	-
Jumlah	403	423

Sumber: diolah

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa, pada tahun 2004 Presiden Yudhoyono terpilih menjadi presiden melalui Pemilu langsung, namun kekuatan PD sebagai partai pendukung utama Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di DPR merupakan minoritas, hanya memperoleh 56 kursi dari 550 kursi. Data tersebut di atas memberikan pemahaman, PD sebagai partai pendukung utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hanya memperoleh sebanyak 149 dari 560 kursi DPR, kekuatan ini tidak cukup untuk mendukung kebijakan-kebijakan-kebijakan presiden di DPR, koalisi merupakan sebuah solusi untuk memperbesar dukungan DPR kepada kebijakan-kebijakan Presiden. Partai yang tidak termasuk dalam barisan koalisi yaitu PDIP, Gerindra, dan Hanura. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

⁵² Leo Suryadinata, *Op.Cit.* h. 19.

pada tahun 2009, membentuk Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintah (Satgas Koalisi), dan menjadikan Aburizal Bakrie Ketua Umum Partai Golkar sebagai Ketua Harian Satgab Koalisi. Kebijakan ini sebagai upaya membangun soliditas koalisi.

Presiden Bambang Yudoyono membangun relasi dengan DPR dan MA, sesuai prosedur kontitusi yang berlaku. Relasi dengan DPR, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memanfaatkan forum konsultasi Presiden-DPR berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis yang akan diambil, terutama yang mungkin menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat, seperti kasus penyelesaian GAM di Aceh.

Penjelasan tersebut di atas memberikan gambaran kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tidak relevan dikategorikan apa disebut Herbert Feith dengan *solidarity maker* atau *administrator*. Alternatifnya adalah kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memiliki gaya demokratis-responsif. Mengajak semua partai politik untuk mendukung pemerintahan dengan imbalan memberi jatah kursi menteri bagi partai yang tergabung dalam koalisi sesuai prosesntase jumlah kursi DPR.

Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan kelompok separatism GAM, mengutamakan pendekatan perdamaian, dengan cara mengutamakan dialog dengan tokoh-tokohnya, dan menyertakan aktor internasional. Kebijakan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut mencapai hasil. Pada tanggal 15 Agustus 2005 tercapai kesepakatan antara pemerintah dengan GAM, yang diwujudkan dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* bertempat di Helsinki Finlandia. Perjanjian ini dikenal dengan istilah MoU Helsinki. Perjanjian damai tersebut melibatkan *Crisis Management Initiative*

(CMI). Implementasi MoU Helsinki di Aceh, melibatkan aktor internasional antara lain negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa dan negara-negara ASEAN.⁵³

Kebijakan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono bidang internasional antara lain adalah memprakarsai membantu Bali Democracy Forum (BDF) yakni forum tahunan antar sebagai kerjasama dalam mengembangkan demokrasi serta platform untuk mempromosikan demokrasi dan perdamaian sebagai solusi dan pencegahan konflik antar negara. Forum ini diadakan setiap tahun, bulan Desember di Bali, Indonesia. Forum ini bertujuan untuk memajukan dan membina kerja sama regional dan internasional di bidang perdamaian dan demokrasi dengan memfasilitasi dialog melalui berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengelola keragaman yang mendorong kesetaraan, saling pengertian, dan rasa hormat.⁵⁴ BDF berhasil menjadikan demokrasi sebagai agenda strategis di kawasan Asia-Pasifik. BDF berhasil memfasilitasi dalam membangun keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan politik, antara menciptakan perdamaian dan keamanan, dan mempromosikan kualitas hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan di kawasan, yang semuanya tercermin dalam tiga pilar pendiri Piagam PBB.

BDF menerapkan prinsip *home-grown democracy* dalam penyebaran demokrasi. Maksud dari prinsip tersebut adalah Indonesia, sebagai tuan rumah sekaligus inisiator BDF, berpatokan pada praktik-praktik nyata nilai demokrasi oleh negara peserta dengan tidak berpretensi untuk menyalahkan atau membenarkan praktik nyata tersebut. BDF secara praktik bersifat inklusif. Sebab demokrasi bisa

⁵³ Naskah MoU Helsinki versi bahasa Indonesia, lihat Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu, Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006, bagian lampiran.

⁵⁴ "Bali Democracy Forum", <https://kemlu.go.id/amman/en/news/2595/bali-democracy-forum> - diakses pada 14 Desember 2020.

berhasil ketika demokrasi bersifat inklusif dan semua orang memiliki kesempatan berkontribusi pada proses demokrasi.⁵⁵

Pertemuan BDF pertama diadakan di Bali pada tanggal 10-11 Desember 2008 dan dihadiri oleh 32 Perwakilan negara-negara Asia Pasifik sebagai delegasi dan delapan perwakilan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sebagai pengamat (Institute for Peace and Democracy, 2008). BDF I, yang mengusung tema "Membangun dan Konsolidasi Demokrasi: Agenda Strategis untuk Asia" memiliki tujuan utama untuk membangun dan mengkonsolidasikan nilai-nilai demokrasi setelah krisis keuangan 1997 menghantam beberapa negara di benua Asia.

Dalam pidato pembukaan pertemuan pertama BDF, Presiden SBY mengatakan,

“Dan sepanjang jalan, kami belajar banyak hal. Kami belajar bahwa pada kebangkitan dari setiap tantangan yang kami hadapi - baik itu terorisme, konflik etnis, atau krisis ekonomi - respons kami, naluri kami adalah untuk selalu memperkuat, bukannya mengurangi, demokrasi –yaitu apa yang kami sebut sebagai "respons demokratis (*democratic response*)”.⁵⁶

Ungkapan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut di atas memperkuat argument, bahwa SBY memiliki gaya kepemimpinan demokratik-responsif, yaitu mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah, terbuka, dan inklusif dalam menyelenggarakan kekuasaan.

Variabel utama yang membentuk kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono seperti itu, dipengaruhi lingkungan nasional dan lingkungan internasional. Lingkungan nasional adalah bangsa Indonesia sedang mengalami proses demokratisasi semenjak tahun 1998. Faktor internasional proses globalisasi dalam semua bidang kehidupan politik, sosial dan ekonomi. Konsekwensinya adalah kerjasama, perdamaian, dan terbuka dengan melibatkan dunia internasional

⁵⁵ “Merangkul Demokrasi Inklusif, Menlu Retno Buka Bali Democracy Forum ke-12”, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/854/berita/merangkul-demokrasi-inklusif-menlu-retno-buka-bali-democracy-forum-ke-12> - diakses pada 16 Dember 2020.

⁵⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010.

dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam negeri. Pengaruh budaya masyarakat Jawa dan latar belakang profesi tantara tidak menonjol dalam kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kepemimpinan Presiden Soekarno bergaya *solidarity maker* yang mengutamakan simbol-simbol persatuan bangsa dalam melaksanakan kekuasaannya seperti konsepnya tentang demokrasi terpimpin. Variabel utama yang mempengaruhi kepemimpinannya adalah budaya Masyarakat Jawa yang mengutamakan legitimasi dan kepatuhan rakyat dalam melaksanakan kekuasaannya. Variabel pendukungnya adalah situasi politik yang dihadapkan pada masa demokrasi parlementer yang diwarnai konflik antar elite.

Kepemimpinan Presiden Soeharto memiliki kepemimpinan *solidarity maker*, mengutamakan simbol-simbol persatuan bangsa, stabilitas politik, dan pembangunan disegala bidang. Kepemimpinan model tampak melihat konsepnya tentang Pancasila khususnya sila persatuan Indonesia dan konsepnya tentang partai politik. Variabel utama yang mempengaruhi kepemimpinannya yang seperti itu

adalah budaya masyarakat Jawa dan latar belakang profesi sebagai tantara yang terbiasa dengan sistem hirarki organisasi dan komando. Variabel pendukungnya adalah situasi krisis politik dan krisis ekonomi yang dihadapi sebelum menjabat presiden.

Kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memiliki gaya demokratis-responsif, dengan ciri mengutamakan cara-cara kompromi, konsultasi, dan adaptasi dengan lingkungan nasional dan internasional. Ciri ini kelihatan dalam membentuk kabinet dengan melakukan koalisi dengan partai pendukung, penyelesaian masalah kelompok seperti GAM di Aceh dengan cara damai dan melibatkan aktor internasional, dan membentuk BDF dengan agenda membangun demokrasi berdasarkan jati negara negara-negara peserta.

Variabel pendukung utama kepemimpinan Presiden yang demikian lebih banyak dipengaruhi lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Lingkungan domestik dimaksud adalah Indonesia semenjak tahun 1998 memasuki era demokratisasi, memaksa presiden untuk menyesuaikan dengan proses demokrasi dalam menyelenggarakan kekuasaannya seperti mengutamakan cara persuasif, dialog, dan kerjasama. Lingkungan internasional, seorang presiden harus menyesuaikan diri dengan proses globalisasi bidang politik dan ekonomi, salah satunya menghendaki kerjasama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.

B. Temuan Penelitian

Beberapa temuan penelitian ini yaitu pertama, kepemimpinan Presiden Soekarno bergaya demokratis-responsif terjadi Ketika terjadi tekanan massa yang didukung Angkatan Darat yang menuntut mundur dari jabatannya akibat krisis politik dan ekonomi. Kedua, kepemimpinan Presiden Soeharto memiliki gaya demokratis-responsif terjadi Ketika tekanan kelompok pro-reformasi yang didukung MPR/DPR yang menuntutnya mundur dari jabatannya akibat krisis ekonomi.

C. Implikasi Teori

Teori Herberth Feith, tentang kepemimpinan *solidarity maker* untuk menjelaskan kepemimpinan Presiden Soekarno, dapat juga menjelaskan kepemimpinan Presiden Soeharto, yang memiliki kepemimpinan *solidarity maker* karena mengutamakan simbol persatuan, stabilitas dalam menjalankan kebijakannya. Variabel utama yang mempengaruhi kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto bergaya *solidarity maker* adalah faktor budaya Masyarakat Jawa mengutamakan kepatuhan rakyat dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Teori Herberth Feith tidak relevan untuk menjelaskan kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang memiliki kepemimpinan demokratis-responsif. Variabel utama yang mempengaruhi kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono adalah situasi lingkungan domestik yang sedang mmenjalani proses demokratisasi dan situasi lingkungan internasional yang sedang proses globalisasi politik dan ekonomi. Model penjelasan kepemimpinan tiga presiden Indonesia dimaksud dirumuskan dalam bagan berikut.



DAFTAR PUSTAKA

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1980.

Assche, Tobias van, Leadership and and Decision Making, John T. Ishiyama & Marijke Breuning (Ed), *21st Century Political Science a Reference Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Wasington DC: Sage Publication Inc, 2011.

Barber, James David. *The Presidential character: Predicting Performance in the White House*, (tird edition) Englewood Cliffs, NJ: Prantice Hall, 1992.

Deen, Rebecca E., "The Presidency," John T. Ishiyama & Marijke Breuning (Ed), *21st Century Political Science a Reference Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Wasington DC: Sage Publication Inc, 2011.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1981.

Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca and London: Cornel University Press, 1962.

Feith Herbert, & Lance Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta:

LP3ES, 1988.

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Hadiz, Vedi R., *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia pasca-Soeharto*, Jakarta, LP3ES, 2005.

Harrison, Lisa, *Political Research: An Introductin*, Routledge: Psychology Press, 2001, pp. 19-52.

Haris, Syamsuddin, “Koalisi dalam Demokrasi Sistem Presidensial Indonesia: Faktor-Faktor Kerapuhan Koalisi Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 8, No.1, 2011, h. 1-14.

Hatta, Mohammad, “Demokrasi Kita” dalam Mohammad Hatta, *Kumpulan Pidato*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.

Jalal, Asran, “Membangun Hubungan kekuasaan Presiden-DPR Menuju Politik Konsolidasi”, dalam Robi Nur Hadi dan Safrizal Rambe, *Profil Politik Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta Pusat Studi Politik Indonesia (PSPI) FISIP UNAS dan Pusat Studi Politik (PSP) Madani Institute, 2005.

Jensic, Alicia, *Qualitative VS Quantitative Research*, John T. Ishiyama & Marijke Breuning *21st Century Political Science ARefernce Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Wasington DC: Sage Publication Inc, 2011.

King, Dwight Y. *Indonesia’s New Order as Bureaucratic Politiy, a Neopatrimonial Regime or a Bureaucratic Authoritritarian Regime: What Difference Doe It Make?* Benecict Anderson and Audrey Kahin (ed), *Interim Reports Series Publication No. 62, Cornell Modern Indonesia Project Southeast Asia Program*, New York: Cornell Uniniversity Ithaca, 1982.

Krissantono (ed), *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS, 1976.

Linz, Juan. “The Perils of Presidensialism, *Journal of Democracy* 1 (1) 51-69.

DOI:10.1353/jod.1990.0011.

Mas' oed, Mohtar, "Lembaga Kepresidenan dan Resep Pengendalian Politik Indonesia", dalam Reza Noer Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Nazaruddin, Sjamsuddin, *Integrasi Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1989.

Robbins, Joseph W. Presidentialism Versus Parliamentarism, John T. Ishiyama & Marijke Breuning (Ed), *21st Century Political Science A Reference Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Wasington DC: Sage Publication Inc, 2011.

Skowronek, Stephen, *The Politics Presidents Make: Leadership from John Adam to Bill Clinton*, Cambridge, Massachusetts, London, Enggland: Harvard University Press, 2000.

Suryadinata, Leo. *Election and Politics in Indonesia*, Singapore, ISEAS, 2002.

Tandjung, Akbar, *The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Tubulensi Politik Era Transisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Rebecca E. Deen, "The Presidency," John T. Ishiyama & Marijke Breuning (Ed), *21st Century Political Science a Reference Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Wasington DC: Sage Publication Inc, 2011, p. 725-735.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: 1998.

Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Vol. I (Panitia Penerbit Di bawah Bendera Revolusi, cetakan ke 2, 1963, hal. 283.

-----, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno, 1984, h. 123.

Saragih, Bintan R, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta:

Smith. M. Brewster, A Map for Analisis personality and Politics, *Journal of Social Issues*, Vol. 24, No. 23, p.

Takwin, Bagus dan Niniek L. Karim, *Sang Kandidat: Analisis Psikologi Politik Lima*

Kandidat Presiden dan Wakil Presiden RI Pemilu 2004, Jakarta: Kompas, 2004.

Widjaja, Albert, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1982.